



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : 39 Pemda kesulitan bayar PPPK  
**Tanggal** : Kamis, 11 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Diungkap Mendagri Di DPR

## 39 Pemda Kesulitan Bayar PPPK

Keluhan sejumlah kepala daerah yang mengalami kesulitan bayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mendapat perhatian serius, termasuk dari Pemerintah dan DPR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR RI mengungkapkan bahwa masih ada puluhan pemerintah daerah yang menghadapi tekanan fiskal serius hingga kesulitan membayar PPPK. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah pusat mengingat penyelesaian tenaga honorer dan pengangkatan PPPK merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi. Tito menyebut setidaknya terdapat 39 pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan keuangan

sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah pusat. Menurut Tito, persoalan utama yang dihadapi sejumlah daerah adalah tingginya porsi belanja pegawai yang bahkan mencapai sekitar 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah sehingga ruang fiskal menjadi semakin terbatas. "Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Kalau di PAD juga akan berat," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senin (8/6/2026). Tito menjelaskan, tingginya belanja pegawai menjadi tantangan besar bagi sejumlah daerah. Ketika

sebagian besar APBD tereserap untuk membiayai aparatur, ruang untuk pembangunan maupun pelayanan publik lainnya menjadi semakin sempit. Meski demikian, Pemerintah tidak mengizinkan solusi berupa pemberhentian pegawai daerah. Pemerintah justru berupaya mencari berbagai jalan keluar agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK maupun pegawai honorer tanpa mengganggu jalannya pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Rycko Menoza menilai Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif agar daerah tidak kehilangan ruang pembangunannya akibat membengkaknya anggaran pegawai.

Menurut Rycko, aspirasi yang disampaikan kepala daerah dalam rapat bersama Kemendagri, KemenPAN-RB, dan Komisi II DPR menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah kini bukan lagi sekadar masalah pengelolaan anggaran, melainkan menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah. "Karena itu diperlukan fleksibilitas dan formula yang lebih adaptif. Jangan sampai aturan yang bertujuan menyehatkan fiskal justru membuat daerah kesulitan menjalankan pelayanan publik," kata Rycko usai rapat kerja, Senin (8/6/2026). Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sheryly Tjoanda Laos menilai melalui Mendagri telah menyiapkan

relaksasi masa transisi penerapan aturan tersebut, tetapi harus ada solusi yang lebih efektif untuk mengatasi persoalan fiskal di daerah. Menurutnya, relaksasi hanya memberi ruang waktu, namun belum menjawab persoalan kemampuan daerah membayar gaji PPPK dan menjaga keberlanjutan pembangunan. "Sebab masalah terbesar kami adalah cash flow. Saat ini kami masih menghadapi kesulitan untuk membayar gaji PPPK hingga akhir tahun anggaran," katanya. Untuk mengupas permasalahan pemerintah daerah yang kesulitan membayar PPPK, berikut wawancara dengan Gubernur Maluku Utara Sheryly Tjoanda Laos dan Anggota Komisi II DPR Rycko Menoza.

### RYCKO MENOZA, Anggota Komisi II DPR RI Pembiayaan PPPK Perlu Dukungan APBN



Bagaimana Anda melihat aspirasi yang disampaikan para kepala daerah kepada Pemerintah dan DPR?  
"Saya menaruh perhatian yang disampaikan para kepala daerah karena persoalan ini sangat penting di seluruh daerah. Relaksasi memang diperlukan, tetapi belum otomatis menyelesaikan persoalan kemampuan fiskal mereka. Yang menjadi masalah utama adalah bagaimana daerah tetap mampu membayar PPPK dan ASN tanpa mengorbankan program pembangunan maupun pelayanan publik. Jadi, sudah menjadi fenomena nasional ini? Ini persoalan nasional. Dalam rapat dengan Kemendagri beberapa waktu lalu, kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan kegelisahan yang hampir sama. Banyak daerah menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan PPPK, sementara kemampuan keuangan daerah tidak tumbuh secepat beban belanja pegawai. Jadi, itu bukan hanya satu atau dua daerah, melainkan persoalan yang harus diatasi solusinya secara nasional.

Apa yang menjadi akar persoalan menurut Komisi II DPR?  
Salah satu persoalan utamanya adalah adanya ketidakseimbangan antara kewajiban daerah dari kapasitas fiskalnya. Di satu sisi, daerah diwajibkan memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk PPPK yang sudah diwajibkan menjadi bagian ASN. Namun, di sisi lain, sebagian daerah masih sangat bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ketika transfer tidak cukup dan belanja pegawai terus meningkat, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin sempit. Sejumbuh kepala daerah menggunakan agar pembiayaan PPPK tertentu didukung APBN. Bagaimana pandangan Anda? Itu salah satu usulan yang kami terima secara serius. Banyak kepala daerah menggunakan agar pembiayaan PPPK, khususnya tenaga pendidik, guru, dan tenaga kesehatan, mendapat dukungan dari APBN. Logikanya sederhana, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan layanan dasar yang menjadi prioritas nasional. Kalau itu, negara perlu hadir membantu daerah agar kebutuhan guru dan tenaga kesehatan tidak menjadi beban fiskal yang terlalu berat bagi Pemerintah daerah. Apakah batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD

masih relevan diterapkan saat ini? Prinsip pengendalian belanja pegawai tentu tetap penting agar APBD tidak habis hanya untuk membayar gaji. Namun, Pemerintah juga harus melihat realitas di lapangan. Banyak daerah saat ini menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Kalau itu, diperlukan fleksibilitas dan formula yang lebih adaptif. Jangan sampai aturan yang bertujuan menyehatkan fiskal justru membuat daerah kesulitan menjalankan pelayanan publik. Apa yang harus menjadi prioritas Pemerintah dalam menyusun kebijakan tahun anggaran 2027? Prioritasnya adalah memastikan daerah tidak terbelani secara berlebihan. ASN dan PPPK harus tetap mendapat kepastian dan kesejahteraan, sementara pelayanan publik juga tidak boleh terganggu. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di daerah. Kita harus mencari titik keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan riil daerah. Bagaimana Komisi II DPR melihat hubungan antara persoalan fiskal daerah dan pembangunan daerah? Hubungan yang erat. Jika terlalu banyak anggaran tererap untuk belanja pegawai, maka anggaran pembangunan otomatis berkurang. ■ RAL

### SHERLY TJOANDA LAOS, Gubernur Maluku Utara Relaksasi Belum Selesaikan Masalah



sebagai daerah harus berinovasi. Namun, persolannya, banyak insaran dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki daerah kini sudah ditarik ke pusat. Akibatnya, ruang gerak kami untuk menyelesaikan persoalan menjadi terbatas. Jadi, ketika daerah diminta lebih kreatif, harus ada ruang dan kewenangan yang juga diberikan kepada daerah untuk melakukannya. Seberapa berat beban belanja pegawai yang ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini? Kondisinya cukup berat. Dana Alokasi Umum (DAU) kami hanya sekitar Rp 960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai kami sudah melampaui DAU yang diterima. Ini menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah bukan sekadar soal elastisitas, tetapi memang ada ketimpangan antara kebutuhan belanja pegawai dan kemampuan pendapatan daerah. Apa solusi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah pusat? Kami tidak menanti solusi beban PPPK ditanggung APBN. Kami juga tidak menanti lambutan DAU secara langsung. Yang kami harapkan adalah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini masih terbelah sekitar 60 persen dapat dibagikan kepada daerah. Jika

sebagai daerah harus berinovasi. Namun, persolannya, banyak insaran dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki daerah kini sudah ditarik ke pusat. Akibatnya, ruang gerak kami untuk menyelesaikan persoalan menjadi terbatas. Jadi, ketika daerah diminta lebih kreatif, harus ada ruang dan kewenangan yang juga diberikan kepada daerah untuk melakukannya. Seberapa berat beban belanja pegawai yang ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini? Kondisinya cukup berat. Dana Alokasi Umum (DAU) kami hanya sekitar Rp 960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai kami sudah melampaui DAU yang diterima. Ini menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah bukan sekadar soal elastisitas, tetapi memang ada ketimpangan antara kebutuhan belanja pegawai dan kemampuan pendapatan daerah. Apa solusi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah pusat? Kami tidak menanti solusi beban PPPK ditanggung APBN. Kami juga tidak menanti lambutan DAU secara langsung. Yang kami harapkan adalah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini masih terbelah sekitar 60 persen dapat dibagikan kepada daerah. Jika

sebagai daerah harus berinovasi. Namun, persolannya, banyak insaran dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki daerah kini sudah ditarik ke pusat. Akibatnya, ruang gerak kami untuk menyelesaikan persoalan menjadi terbatas. Jadi, ketika daerah diminta lebih kreatif, harus ada ruang dan kewenangan yang juga diberikan kepada daerah untuk melakukannya. Seberapa berat beban belanja pegawai yang ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini? Kondisinya cukup berat. Dana Alokasi Umum (DAU) kami hanya sekitar Rp 960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp 1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai kami sudah melampaui DAU yang diterima. Ini menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah bukan sekadar soal elastisitas, tetapi memang ada ketimpangan antara kebutuhan belanja pegawai dan kemampuan pendapatan daerah. Apa solusi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah pusat? Kami tidak menanti solusi beban PPPK ditanggung APBN. Kami juga tidak menanti lambutan DAU secara langsung. Yang kami harapkan adalah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini masih terbelah sekitar 60 persen dapat dibagikan kepada daerah. Jika

“ Kami berharap Pemerintah melihat persoalan ini secara utuh. Jangan hanya berfokus pada angka persentase belanja pegawai, tetapi juga melihat kondisi riil daerah.

“ Kami berharap Pemerintah Pusat dan DPR dapat mencari solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan fiskal daerah.